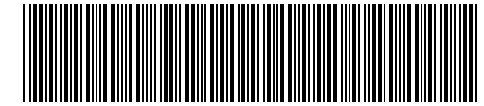




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.667774/2022**



DS:8566-7049-8683-1568

Revisi ke 02

Tanggal : 11 Februari 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 1.341.596.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.341.596.000
Rp. 1.341.596.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.341.596.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 1.341.596.000

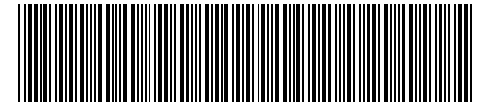
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



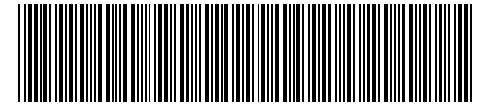
DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.341.596.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.341.596.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	518.832.000	
Rincian Output		:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	518.832.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	48,00	orang	324.464.000	
Rincian Output		:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	48.00	orang	324.464.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	498.300.000	
Rincian Output		:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	498.300.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

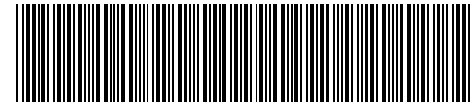
ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022

I B. SUMBER DANA



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.341.596.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.341.596.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
5252.AEA	Koordinasi (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	518.832	-	-	-	518.832	33 . 01	
01	RM	-	518.832	-	-	-	518.832	065@	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	324.464	-	-	-	324.464	33 . 00	
01	RM	-	324.464	-	-	-	324.464	065@	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	498.300	-	-	-	498.300	33 . 00	
01	RM	-	498.300	-	-	-	498.300	065@	
JUMLAH		-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

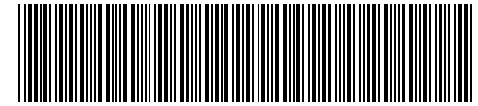
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	36.000	54.000	54.000	54.000	36.000	36.000	54.464	438.300	180.918	294.704	103.210	1.341.596
		BELANJA BARANG	0	36.000	54.000	54.000	54.000	36.000	36.000	54.464	438.300	180.918	294.704	103.210	1.341.596
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	36.000	54.000	54.000	54.000	36.000	36.000	54.464	438.300	180.918	294.704	103.210	1.341.596
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	36.000	54.000	54.000	54.000	36.000	36.000	54.464	438.300	180.918	294.704	103.210	1.341.596

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
IV A. B L O K I R**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667774] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT		Automatic Adustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 525.243		Disposisi: Automatic Adjustment
	52 Belanja Barang Rp. 525.243	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.080
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Automatic Adustment
5252.AEA	Koordinasi	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.941	521211	Belanja Bahan(RM)
	Automatic Adustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.289
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adustment
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Automatic Adustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 720
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adustment
	522141 Belanja Sewa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Automatic Adustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.019
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adustment
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.440	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Automatic Adustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.760
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adustment
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.994		Disposisi: Automatic Adjustment
	Automatic Adustment	521211	Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Automatic Adustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.280		Disposisi: Automatic Adjustment
		521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
IV A. B L O K I R**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667774] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

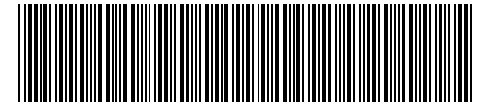
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adustment Rp. 25.600 Disposisi: Automatic Adjustment		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adustment Rp. 1.200 Disposisi: Automatic Adjustment		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adustment Rp. 800 Disposisi: Automatic Adjustment		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adustment Rp. 165.520 Disposisi: Automatic Adjustment		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adustment Rp. 3.000 Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:8566-7049-8683-1568

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667774] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332